


Sosialisasi Peran Serta Masyarakat Dalam Era Digital: Peluang Dan Tantangan Untuk Meningkatkan Keterlibatan Warga dalam Kebijakan Publik

Adhi Putra Satria

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Jawa Tengah, Indonesia.

 : adhi-putrasatria@untagsmg.ac.id

Keywords:

Public Participation; Online Participation; Digital Platform.

Kata Kunci:

Partisipasi Masyarakat; Partisipasi Online; Platform Digital

Abstract

With the advancement of information and communication technology, the transformation of public participation from conventional methods to digital platforms has become critically important. This article discusses the opportunities and challenges faced in enhancing public participation through digital media and provides strategic recommendations for the government to overcome these barriers. This article is based on community service activities conducted through lectures in the form of outreach, and the results were processed using various data sources that were analyzed and explained qualitatively. The findings indicate that the government can utilize social media, online participation platforms, big data, and mobile applications to collect feedback and engage the public in the policy-making process more broadly. However, challenges such as the digital divide, limited digital literacy, and information overload need to be addressed to ensure effective digital participation.

Abstrak

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, transformasi partisipasi masyarakat dari metode konvensional menuju platform digital telah menjadi sangat penting untuk dibicarakan. Artikel ini membahas tentang peluang dan tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui media digital, serta memberikan rekomendasi strategi yang dapat diterapkan oleh pemerintah untuk mengatasi hambatan tersebut. Artikel ini merupakan artikel hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara ceramah dalam bentuk penyuluhan, hasil tersebut diolah dengan berbagai sumber data yang dianalisis dan dijelaskan secara kualitatif. Hasil pembahasan pada artikel ini menunjukkan bahwa Pemerintah dapat memanfaatkan media sosial, platform partisipasi online, big data, dan aplikasi mobile untuk mengumpulkan umpan balik dan melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan secara lebih luas. Namun, tantangan seperti kesenjangan digital, keterbatasan literasi digital, dan overload informasi perlu diatasi untuk memastikan partisipasi digital yang efektif.

Pendahuluan

Partisipasi masyarakat telah menjadi isu penting dalam diskusi kebijakan publik di seluruh dunia. (Mariana, 2017) Partisipasi masyarakat dianggap sebagai cara untuk memastikan bahwa kebijakan publik mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. (Iskandar, 2017) Namun, partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik seringkali masih terbatas dan tidak secara sempurna dapat merata kepada seluruh lapisan masyarakat. (Rahman, 2016) terutama apabila kita mempertanyakan bagaimana hasil dari partisipasi masyarakat tersebut dapat direalisasikan atau

dapat mempengaruhi suatu kebijakan publik yang akan diambil, maka ketidaksempurnaan sebagaimana dimaksud akan tampak sangat jelas.

Partisipasi masyarakat di era saat ini, sejatinya sudah mulai bertransformasi melalui berbagai platform digital, (Ramdani & Habibi, 2017) dimana masyarakat cenderung menyampaikan berbagai macam aspirasinya melalui berbagai kanal-kanal media sosial. (Morissan, 2014) Fakta demikian tidak bisa dilepaskan dari adanya kemajuan teknologi informasi yang berkembang sangat pesat. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi digital telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi, berinteraksi, dan berpartisipasi. (Setiadi, 2016) Teknologi digital sejatinya telah memberikan peluang baru untuk partisipasi masyarakat yang lebih mudah dan inklusif. Namun, transformasi partisipasi masyarakat dalam era digital juga menghadirkan tantangan tersendiri, sehingga perlu dilakukan sebuah pencarian Solusi atas tantangan yang ditimbulkan dari adanya perubahan partisipasi masyarakat dengan menggunakan sarana teknologi informasi. (Mariyam & Putra Satria, 2023)

Dalam konteks ini, artikel hasil pengabdian ini akan membahas mengenai transformasi partisipasi masyarakat dalam era digital, dengan fokus pada peluang dan tantangan untuk meningkatkan keterlibatan warga dalam kebijakan publik. Melalui analisis literatur dan metode ceramah kepada masyarakat, artikel hasil pengabdian ini mengidentifikasi perubahan dalam partisipasi masyarakat yang disebabkan oleh teknologi digital dan tantangan yang muncul.

1. Metode Pengabdian

Metode pelaksanaan pengabdian yang digunakan dalam Sosialisasi Peran Serta Masyarakat Dalam Era Digital: Peluang Dan Tantangan Untuk Meningkatkan Keterlibatan Warga Dalam Kebijakan Publik, meliputi berbagai langkah dan strategi yang terintegrasi. Pertama, dilakukan analisis atas permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan isu partisipasi masyarakat saat ini dan inventarisir data untuk memahami akan kebutuhan pemahaman nilai partisipasi masyarakat di kehidupan bernegara. Selanjutnya adalah dilakukannya pengenalan dengan mengadakan sosialisasi di masyarakat, yang dalam hal ini peserta yang dilibatkan adalah mayoritas kaum milenial. Penyusunan artikel ini menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan empiris, sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer berupa bahan yang sudah ada seperti regulasi atau dokumen resmi lainnya, bahan hukum sekunder berupa data yang bersumber dari studi kepustakaan dan bahan hukum tersier berupa data KBBI serta kamus hukum

Hasil Dan Pembahasan

a. Peluang pemerintah dalam Meningkatkan Keterlibatan Warga dalam Kebijakan Publik pada era digital

Dalam era digital, partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik dapat ditingkatkan melalui berbagai peluang yang disediakan oleh teknologi informasi dan komunikasi. (Morrisan, 2016) Peluang-peluang tersebut dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik. (Lailiyah, 2022) Sebelum membahas mengenai peluang tentang partisipasi masyarakat secara digital dalam membuat ataupun melaksanakan kebijakan public, sejatinya perlu diketahui dan tekankan diawal bahwa pada dasarnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan kebijakan public sangat penting. (Sya'bani et al., 2023)

Manfaat partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik, dapat dianalisis sebagai berikut : (Rahim, 2004)

- a) Memberikan landasan yang lebih baik untuk pembuatan kebijakan publik.
- b) Memastikan adanya implementasi yang lebih efektif karena warga mengetahui dan terlibat dalam pembuatan kebijakan publik.
- c) Meningkatkan kepercayaan warga kepada eksekutif dan legislatif.

- d) Efisiensi sumber daya, sebab dengan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan mengetahui kebijakan publik, maka sumber daya yang digunakan dalam sosialisasi kebijakan public dapat dihemat.

Pada prinsipnya, nyawa dari sebuah partisipasi masyarakat adalah adanya keterbukaan/transparansi dari pemerintah untuk mau membuka seluruh agenda kegiatan kebijakan public yang akan dan sedang dilaksanakan. Dengan keterbukaan maka kemudian masyarakat dapat menjalankan fungsinya dalam mengontrol, mengawasi dan memberikan masukan atas suatu kebijakan public tertentu. (Karjuno Dt. Maa, 2009)

Pertanyaan selanjutnya adalah bahwa ketika pemerintah pusat atau pemerintah daerah melaksanakan partisipasi masyarakat melalui cara dan praktik-praktik yang lazim dilaksanakan seperti reses, rapat dengan pendapat, audiensi dan sebagainya, (Fatkhurrohman & Sjuhad, 2018) maka cara-cara ini sudah sangat konvensional dan sebenarnya hanya menjangkau aspirasi dari masyarakat-masyarakat tertentu, bukan masyarakat secara umum. Mengingat kualitas dari partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dari sebanyak-banyaknya masyarakat, maka sejatinya di era digitalisasi ini pemerintah perlu melakukan transformasi partisipasi secara digital, dimana kemajuan teknologi informasi dapat digunakan sebagai peluang dalam menerima masukan dan menampung serta menindaklanjuti apa yang menjadi keinginan masyarakat umum dalam membentuk suatu kebijakan public tersebut.

Pada bagian ini penulis akan mencoba memberikan deskripsi tentang beberapa peluang pemerintah dalam meningkatkan keterlibatan warga dalam kebijakan publik pada era digital yang meliputi antara lain:

1. Pertama, pemerintah dapat menggunakan media sosial sebagai alat untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik. Dalam hal ini, pemerintah dapat membuat akun media sosial resmi yang digunakan untuk mempublikasikan informasi tentang kebijakan publik yang sedang dibahas dan meminta masukan dari masyarakat melalui komentar atau forum diskusi yang disediakan. Selain itu, pemerintah juga dapat memanfaatkan alat polling di media sosial untuk mengukur tingkat dukungan masyarakat terhadap suatu kebijakan. (Syailendra Reza Irwansyah Rezeki, 2020)
2. Kedua, pemerintah dapat mengembangkan platform partisipasi masyarakat online yang berfungsi sebagai forum untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik. Platform ini dapat berisi informasi tentang kebijakan publik yang sedang dibahas, formulir umpan balik, dan ruang diskusi yang dapat diakses oleh masyarakat secara online. Platform ini juga dapat berfungsi sebagai tempat untuk memantau keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik.
3. Ketiga, pemerintah dapat menggunakan teknologi big data dan analisis data untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan memprediksi efek dari kebijakan publik yang sedang dibahas. Dalam hal ini, data yang dikumpulkan dari media sosial, forum diskusi online, atau survei online dapat diolah dan dianalisis menggunakan teknik analisis data untuk menghasilkan informasi yang berguna dalam proses pembuatan kebijakan publik.
4. Keempat, pemerintah dapat mengembangkan aplikasi mobile yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan umpan balik langsung dari smartphone mereka. Aplikasi ini dapat digunakan untuk mengumpulkan umpan balik tentang kebijakan publik yang sedang dibahas atau untuk memberikan laporan tentang masalah yang dihadapi masyarakat di wilayah tertentu.

Memperhatikan hal-hal diatas, maka pada prinsipnya saat ini Indonesia perlu mengembangkan sistem e-partisipasi, dimana Pemerintah dapat mendorong e-partisipasi atau partisipasi elektronik dalam kebijakan publik. E-partisipasi merupakan konsep penggunaan

teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi partisipasi warga dalam proses pembuatan kebijakan publik. Dengan adanya e-partisipasi, warga dapat memberikan masukan dan pandangan mereka secara online tanpa harus hadir di pertemuan fisik. E-partisipasi juga diharapkan menjadi model partisipasi masyarakat yang akuntabel, mengingat aspirasi masyarakat yang disampaikan dapat disalurkan secara mudah, dan dapat ditindaklanjuti secara transparan melalui aplikasi tertentu, yang pada akhirnya aspirasi masyarakat sebagai bentuk dari partisipasi masyarakat dapat benar-benar kuat, dalam arti tidak berada pada derajat partisipasi masyarakat yang semu.

b. Tantangan dan upaya untuk Meningkatkan Keterlibatan Warga dalam Kebijakan Publik pada era digital

Pengembangan model partisipasi masyarakat yang berbasis digital memiliki nilai positif tersendiri bagi pengembangan dan perbaikan kualitas kebijakan public yang lebih baik, (Eko Harry Susanto, 2011) sebab demikian kebijakan public yang didasarkan pada aspirasi masyarakat secara luas dapat benar-benar menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat. Namun demikian atas model pengembangan partisipasi masyarakat yang berbasis pada teknologi informasi bukan tanpa tantangan, maka pada bagian ini penulis akan mencoba memberikan deskripsi mengenai apa saja tantangan yang dihadapi dalam menerapkan pengembangan partisipasi masyarakat secara digital yang telah diidentifikasi sebagai berikut

Pertama terjadinya fenomena Kesenjangan digital, (Purnia et al., 2020) Tantangan pertama dalam meningkatkan keterlibatan warga dalam kebijakan publik pada era digital adalah kesenjangan digital. Tidak semua warga memiliki akses yang sama terhadap teknologi digital, seperti internet dan smartphone. Kedua, terjadinya fenomena keterbatasan literasi digital, Tantangan kedua ini terjadi karena Banyak warga yang tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup dalam menggunakan teknologi digital. Ketiga terjadi fenomena Overload informasi dalam era digital, banyak informasi yang tersedia dan seringkali sulit bagi warga untuk memfilter dan mengevaluasi informasi yang benar-benar sesuai. Pemerintah harus menyediakan informasi yang jelas, terpercaya dan mudah diakses untuk memastikan bahwa warga dapat berpartisipasi dalam kebijakan publik dengan tepat.

Dalam mengatasi tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan keterlibatan warga dalam kebijakan publik pada era digital, terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan, antara lain Meningkatkan aksesibilitas informasi: Pemerintah dapat meningkatkan aksesibilitas informasi publik dengan mengembangkan teknologi informasi yang lebih efektif dan efisien. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan media sosial, website resmi pemerintah, dan aplikasi mobile untuk memberikan informasi yang lebih mudah diakses dan dipahami oleh warga.

Kedua adalah Pemerintah perlu memberikan pelatihan dan pendidikan mengenai penggunaan teknologi dan informasi bagi warga. Dengan cara ini, warga dapat lebih efektif dalam menggunakan teknologi untuk terlibat dalam kebijakan publik. Ketiga yaitu Pemerintah perlu memastikan transparansi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan informasi yang lebih terbuka dan terbuka pada publik, sehingga warga dapat memiliki akses yang lebih baik pada informasi yang diperlukan untuk terlibat dalam kebijakan publik. Dalam arti transparansi dan akuntabilitas dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang telah diterima, memberikan kepastian apakah atas aspirasi masyarakat yang disampaikan pada platform digital dapat dilanjutkan atau ditolak

Terakhir adalah Pemerintah perlu menerapkan teknologi terbaru dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan kecerdasan buatan, big data, dan analisis data untuk memperoleh informasi yang lebih akurat

dalam menjangkau dan memprediksi kebutuhan warga. Dengan cara ini, kebijakan publik dapat lebih tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan warga secara efektif dan efisien.

Kesimpulan

Pengembangan partisipasi masyarakat berbasis digital dapat menjadi peluang untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah dapat menciptakan mekanisme partisipasi yang lebih inklusif, efisien, dan transparan. Transformasi digital ini memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan dan pandangan mereka dengan lebih mudah dan cepat, serta memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Namun, tantangan seperti kesenjangan digital, keterbatasan literasi digital, dan informasi yang berlebihan perlu diatasi untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat secara digital. Upaya peningkatan aksesibilitas informasi, pendidikan teknologi, dan transparansi dalam pengambilan keputusan adalah langkah-langkah penting yang harus dilakukan. Dengan mengadopsi teknologi terbaru dan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, pemerintah dapat memperkuat demokrasi dan menciptakan kebijakan publik yang lebih efektif dan responsif.

Daftar Pustaka

- Eko Harry Susanto. (2011). *Media Baru, Kebebasan Informasi dan Demokrasi di Kalangan Generasi Muda. Universitas Tarumanegara.*
- Fatkhurrohman, F., & Sjuhad, M. (2018). Pengaruh Pelaksanaan Jaring Aspirasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif. *Jurnal Media Hukum*, 25(2). <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0114.190-201>
- Iskandar, D. J. (2017). PENTINGNYA PARTISIPASI DAN PERANAN KELEMBAGAAN POLITIK DALAM PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 14(1). <https://doi.org/10.31113/jia.v14i1.2>
- Karjuno Dt. Maa. (2009). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik. *Demokrasi*, no 1(VIII).
- Lailiyah, K. (2022). DIGITALISASI DESA SEBAGAI UPAYA PERCEPATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE. *RISTEK : Jurnal Riset, Inovasi Dan Teknologi Kabupaten Batang*, 6(2). <https://doi.org/10.55686/ristek.v6i2.112>
- Mariana, D. (2017). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES KEBIJAKAN. *CosmoGov*, 1(2). <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i2.11834>
- Mariyam, S., & Putra Satria, A. (2023). Pengaruh Monitoring Rakyat Pada Media Sosial Terhadap Proses Penegakan Hukum Di Indonesia. *Unes Law Review*, 5(3).
- Morissan. (2014). Media Sosial dan Partisipasi Sosial di Kalangan Generasi Muda. *Jurnal Visi Komunikasi*, 13(01).
- Morissan. (2016). Tingkat Partisipasi Politik dan Sosial Generasi Muda. *Visi Komunikasi*, 15(01).
- Purnia, D. S., Adiwisastro, M. F., Muhajir, H., & Supriadi, D. (2020). Pengukuran Kesenjangan Digital Menggunakan Metode Deskriptif Berbasis Website. *EVOLUSI : Jurnal Sains Dan Manajemen*, 8(2). <https://doi.org/10.31294/evolusi.v8i2.8942>
- Rahim, E. I. (2004). Partisipasi Dalam Perspektif Kebijakan Publik. *Jurnal Perspektif Kebijakan Publik*, 2004.
- Rahman, K. (2016). Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. *Jurnal*

Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi, 2(1).

Ramdani, D. F., & Habibi, F. (2017). Penguatan Partisipasi Masyarakat Dalam Mendorong Program Smart City di Kota Bandung. *Prosiding Seminar Nasional Riset Terapan | SENASSET*, 0(0).

Setiadi, A. (2016). Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektifitas Komunikasi, *Jurnal Humaniora. Universitas Bina Sarana Informatika*, 1.

Sya'bani, I. N., Amelia, R., Nada, F. Q., & Hasanah, A. (2023). Peran Media Sosial Sebagai Agen Sosialisasi Politik Untuk Generasi Muda. *SEMAYO: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(1).

Syailendra Reza Irwansyah Rezeki, Y. R. R. Z. (2020). PENGGUNAAN SOSIAL MEDIA TWITTERDALAM KOMUNIKASI ORGANISASI(Studi Kasus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta DalamPenanganan Covid-19). *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES*, 4.